

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri, Australia dengan tegas menolak untuk menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara Asia, termasuk Tiongkok. Pada dasarnya, sikap diplomatik Australia tersebut sangat dipengaruhi oleh warisan kolonial Inggris terkait gagasan superioritas bangsa kulit putih. Sebagai bangsa yang tidak memiliki akar sendiri terhadap tradisi sejarahnya, Australia mewarisi dan melembagakan setiap ideologi yang diyakini Inggris termasuk meyakini fantasi kontinental kulit putih (Atkinson, 2015: 16). Dengan cepat, kondisi ini mendorong Perdana Menteri Pertama Australia, Edmun Barton untuk mengembangkan kebijakan imigran yang tidak ramah dan eksklusif yaitu menjauhkan siapapun yang bukan bangsa Eropa di Australia. Hal tersebut tercermin dari pemberlakuan *Immigration Restriction Act of 1901* dan *White Australia Policy* yang menghasilkan “penolakan imigran kuning”, sehingga telah berdampak langsung pada pengucilan imigran Tiongkok di Australia.

Di sisi lain, sikap pesimis Australia terhadap Tiongkok juga tidak terlepas dari pola hubungan luar negeri Australia yang didominasi dan diikat erat oleh Inggris. Kondisi ini disebabkan oleh konsekuensi Australia menjadi bagian dari *British Commonwealth of Nations* sehingga memiliki naluri untuk mengembangkan kebijakan luar negeri yang tunduk pada Inggris. Walaupun demikian, pada tahun

1907, Inggris telah memberikan status *dominion* terhadap Australia agar memiliki kekuasaan penuh untuk mengatur urusan dalam dan luar negerinya dengan tetap mengakui Raja/Ratu Inggris. Hanya saja, hingga akhir tahun 1930-an tepat sebelum Perang Dunia II, Australia masih mengandalkan Inggris dalam melindungi berbagai kepentingan ekonomi, politik hingga keamanan dan pertahanannya.

Memasuki periode Perang Dunia II khususnya ketika Pearl Harbour berhasil diledakkan oleh Jepang, Pemerintah Australia justru mendorong hubungan luar negeri yang kuat dengan Amerika Serikat. Tentunya, ini disebabkan oleh agresivitas Jepang di kawasan yang membuat Australia semakin tersudut. Di sisi lain, selama perang berlangsung Australia juga menyadari lemahnya kemampuan Inggris dan secara bersamaan Amerika Serikat muncul sebagai pemimpin blok Barat yang tidak terkalahkan (Mackerras, 2014: 225). Atas kondisi tersebut, maka hubungan Australia-Amerika berkembang menjadi semakin penting khususnya di bidang keamanan dan pertahanan. Bahkan, pada periode Perang Dingin kedua negara berhasil membentuk *collective security* ANZUS (*Australia, New Zealand, United State*) dalam membendung ancaman komunisme di kawasan Pasifik. Kondisi ini semakin menandai bahwa Australia sulit mempertimbangkan hubungan diplomatiknya yang substansial bersama dengan Tiongkok.

Berkaitan dengan penjelasan di atas, penulis sepakat bahwa Perang Dingin menjadi peristiwa penting untuk digarisbawahi dalam menjelaskan penyebab sulitnya hubungan diplomatik bagi Australia dan Tiongkok. Peristiwa tersebut berhasil menunjukkan bahwa faktor ideologi merupakan salah satu penghambat hubungan kedua negara. Argumen ini didukung oleh artikel yang ditulis oleh Mark

Beesona dan Jinghan Zengb (2016) yang menyebutkan Australia dan Tiongkok mustahil untuk bermitra satu sama lainnya. Asumsi tersebut lahir dari pemikiran bahwa Tiongkok merupakan negara komunis dan Australia digambarkan sebagai ‘pembela setia neoliberalisme’ sehingga sulit untuk bersatu (Beesona dan Zengb, 2016: 294). Perbedaan ideologi dan potensi ancaman komunis tampaknya semakin relevan untuk menjelaskan dinginnya sikap Australia terhadap Tiongkok saat itu.

Namun, dalam tatanan politik internasional, hubungan Australia-Tiongkok tentunya tidak dapat digambarkan sebagai kondisi yang statis dan abadi. Di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Gough Whitlam, hubungan diplomatik Australia dan Tiongkok berhasil memasuki babak baru dengan tren yang positif. Pasca pelantikannya, PM Whitlam melakukan kunjungan diplomatiknya ke Tiongkok tahun 1971 (Hayden, 1984: 86). Pada kesempatan yang sama, PM Whitlam mengumumkan perubahan bersejarah dalam kebijakan luar negeri Australia yaitu keputusannya untuk memindahkan Kedutaan Besar Australia dari Taipei ke Peking. Keputusan tersebut menegaskan bahwa Australia mengakui posisi Tiongkok sebagai pemerintahan yang sah. Peristiwa ini penting karena sejak tahun 1949, alih-alih mengakui Tiongkok, Australia justru dengan tegas menetapkan diri untuk berpihak pada Taiwan. Secara eksplisit, keputusan ini menjadi tanda diresmikannya hubungan diplomatik Australia-Tiongkok dan disimpulkan pada sebuah komunike, berikut ini:

... The Australian Government recognises the Government of the People's Republic of China as the sole legal Government of China, aknowlegdes the position of the Chinese Government that Taiwan is a province of the People's Republic of China, and has decided to remove its official representation from Taiwan before 25 January 1973. The Government of the People's Republic of China appreciates the above stand of the Australian Government. (Whitlam, 2002: 331).

Keputusan kontroversial yang diambil oleh PM Whitlam terkait peningkatan hubungan luar negeri Australia dan Tiongkok tentu dilatarbelakangi oleh sejumlah alasan. Berdasarkan penelusuran historis, Catatan Urusan Luar Negeri Australia pada November 1972 merangkum empat alasan utama yang mendorong Australia menjadi promotor terhadap kebijakan “Pro-Tiongkok” yaitu :

... First and simplest it was to fill the great blank in our political geography. Recognising governments does not represent a statement that we accept those governments' policies. It recognises the reality of their existence and authority.

Secondly, the development of relations with China has been seen as contributing a proper balance and a necessarily greater degree of independence of our foreign policy

Thirdly, support for China's active participation in the international community was seen as a desirable end in itself. Ostracism of China was not defensible.

Fourth, it facilitates the development of relations among countries in our region that best serve our interest in security and independence in a co-operative environment (Hayden, 1984: 87).

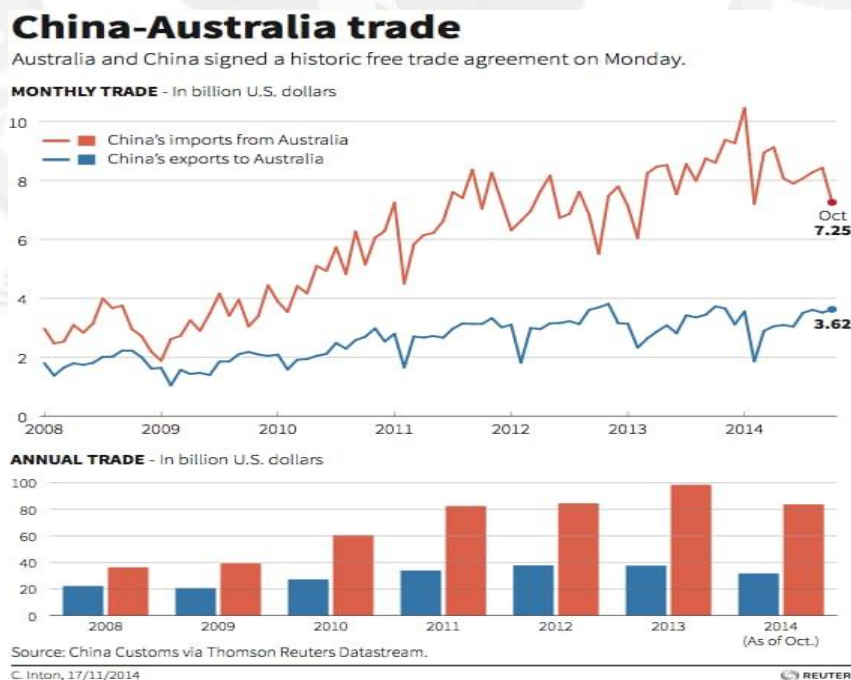
Mengacu pada penjelasan di atas, PM Whitlam menekankan kunci politik yang dikejar Australia saat itu adalah upaya negara untuk membuka peluang dan kerjasama ekonomi ke seluruh dunia. Keputusan tersebut tentu tidak terlepas dari misi pemerintah untuk membentuk kebijakan luar negeri Australia yang lebih independen dengan Amerika Serikat (Mackerras, 2014: 235). Oleh karenanya, motif hubungan Australia terhadap Tiongkok diprioritaskan utamanya pada misi perdagangan. Terlebih, pertumbuhan ekonomi Tiongkok bangkit begitu pesat sehingga memaksa Australia untuk mengambil kesempatan dalam menjalin hubungan ekonomi yang saling menguntungkan bersama Tiongkok.

Lambat laun, kedua negara berhasil mengkonsolidasikan hubungan yang harmonis antara politik, ekonomi dan sosial-budaya yang lebih luas. Perkembangan hubungan diplomatik Australia-Tiongkok yang berkelanjutan ini juga disebabkan oleh persepsi publik yang saling memiliki pandangan positif satu sama lainnya akibat pesatnya toleransi budaya dan kredibilitas sektor pendidikan. Dalam hal ini, pendidikan Australia memiliki reputasi yang baik di kalangan pelajar Tiongkok. Bahkan, pada tahun 2010 Tiongkok menjadi sumber pelajar asing terbesar di Australia dengan total 130.000 pelajar atau setara 45,7% dari total pelajar Tiongkok di luar negeri (Liu dan Hao, 2014: 379). Dengan demikian, sektor pendidikan ini terbukti mendatangkan keuntungan ekonomi yang begitu besar bagi Australia. Hal ini tentunya tidak terlepas dari pendapatan Australia melalui jumlah pengeluaran yang dihasilkan oleh para pelajar Tiongkok seperti biaya pendidikan hingga konsumsi barang dan jasa selama menempuh pendidikan di Australia.

Penjelasan di atas semakin menunjukkan bahwa dimensi manusia dan masyarakat juga memainkan penting dalam kuatnya hubungan bilateral Australia-Tiongkok. Menurut laporan yang dirilis oleh Australian Bureau of Statistic, pada tahun 2018 Australia telah menjadi rumah bagi 1,2 juta bagi orang keturunan Tionghoa (Kizekova, 2021: 202). Secara bersamaan, kondisi ini telah mendorong berbagai “dialek” atau bahasa Mandarin mendapat eksistensi dan popularitas yang begitu tinggi di Australia. Oleh karena itu, kedudukan bahasa Mandarin di Australia menjadi bahasa yang paling banyak digunakan setelah bahasa Inggris (Liu dan Hao, 2014: 378). Hal ini menjadi sinyal kuat bahwa budaya Tiongkok begitu mempengaruhi berbagai kehidupan sosial di ruang publik Australia.

Dalam perjalanannya, aspek ekonomi bangkit menjadi bagian terpenting dan mendasari hubungan diplomatik Australia dan Tiongkok. Pada tahun 2007, Tiongkok tercatat menjadi satu-satunya pasar ekspor dan investor terpenting bagi Australia, menggantikan Jepang (Kizekova, 2021: 198). Tingginya tingkat ketergantungan ekonomi Australia disebabkan oleh prospek pasar Tiongkok yang begitu besar dengan memasok beragam komoditas seperti batu bara, bijih nikel dan besi, wol, lobster, hingga makanan olahan (Kizekova, 2021: 198). Mengutip data yang dirilis oleh China Custom via Thomas Reuters Datastream (2014), tahun 2013 total perdagangan Tiongkok dari Australia melalui ekspor-impor mencapai nilai tertinggi yaitu menyentuh 140 Miliar USD. Kondisi ini menjadi bukti nyata bahwa pengaruh Tiongkok dapat dilihat di setiap aspek ekonomi Australia.

Grafik 1.1 Tren Ekspor dan Impor dalam Perdagangan Australia-Tiongkok pada tahun 2008-2014



(Matt Siegel, 2014. Diakses melalui <https://www.businessinsider.com/china-just-signed-what-may-be-its-best-ever-trade-deal-with-a-western-country-2014-11> pada 18 Februari 2023)

Nilai perdagangan yang fantastis tentu menjadi faktor pertimbangan bagi Australia dan Tiongkok untuk menjalin hubungan yang lebih kuat dan mendalam. Hal tersebut berhasil diterjemahkan melalui penandatanganan *Australia-China Free Trade Agreement* (ACHFTA) pada tahun 2015. Pentingnya kesepakatan ini disebabkan oleh unsur dan substansi yang ditekankan seperti pemberlakuan bebas tarif bagi 95% komoditas ekspor Australia di pasar Tiongkok dan melonggarkan pembatasan bagi investasi Tiongkok di Australia (Australian Trade and Investment Commission, 2023). Kemudian, melalui kesepakatan tersebut kedua negara juga telah mengakui satu sama lain sebagai mitra strategis dan komprehensif. Dapat dikatakan pengakuan ini menjadi sejarah berharga bagi Australia-Tiongkok dan secara simbolis menandai hubungan diplomatiknya berada pada '*Golden Era*'. Untuk memperkuat pernyataan di atas, hal ini dapat dilihat melalui pidato yang disampaikan PM Tony Abbott saat penandatanganan ACHFTA berikut ini :

"...With free trade negotiations concluded and with a comprehensive strategic partnership established, this is a historic and memorable day. On behalf of the government and the people of Australia, I welcomed His Excellency Xi Jinping on his first visit to Australia as President of China" (Pidato PM Tony Abbott dalam VOA News, 2015).

Namun, romantisme hubungan yang terjalin antara Pemerintah Australia dan Tiongkok tersebut tidak berlangsung lama. Sebab, pada tahun 2018 Scott Morrison berhasil dilantik sebagai Perdana Menteri Australia untuk periode empat tahun ke depan dan secara resmi menggantikan PM Tony Abbott. Hanya saja, di bawah pemerintahan PM Scott Morrison hubungan diplomatik Australia-Tiongkok digambarkan berada pada titik terburuk yang pernah ada (Okano, 2021: 1).

Kondisi tersebut diperkuat dengan studi yang dilakukan oleh Para Ahli dan Akademisi Hubungan Internasional di Universitas Tsinghua yang mengukur hubungan Tiongkok dengan Australia melalui data kuantitatif (Pan dan Korolev, 2021: 116). Dalam hal ini, tujuannya untuk memberikan pemeringkatan berbasis nilai pada peristiwa diplomatik tertentu, dimana nilai 9 adalah level tertinggi. Seperti tercantum pada Gambar 2. Indeks Penilaian Hubungan Diplomatik Australia-Tiongkok menunjukkan bahwa tren kemunduran hubungan diplomatik kedua negara dimulai sejak tahun 2018 dan terus merosot ke nilai 4.5 pada tahun 2020. Indeks tersebut semakin meyakinkan hubungan Australia-Tiongkok berada pada titik terendah yang pernah ada. Bahkan, segmen berwarna merah menunjukkan peristiwa COVID-19 sebagai akseleratornya.

Grafik 1.2 Indeks Penilaian Hubungan Diplomatik Australia-Tiongkok berdasarkan Studi Universitas Tsinghua tahun 2014-2020

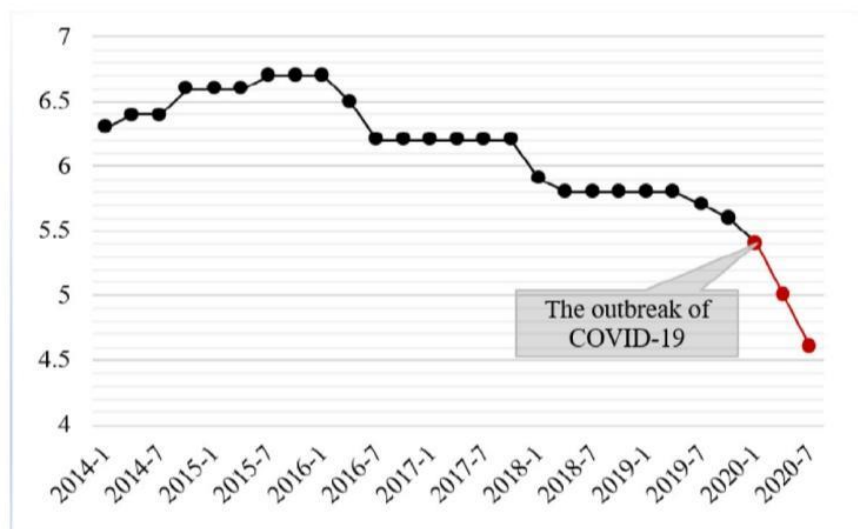


Fig. 1 Assessment of Australia-China relations (Source: Calculated by the author based on the Tsinghua University dataset 'China's Relations with Great Powers')

(Pan dan Korolev, 2021: 117)

Lebih lanjut, artikel yang ditulis oleh Australia-China Relations Institute (ACRI) (2021) dengan judul “ *The Morrison Government and China*” menjelaskan bahwa pemicu dari kemunduran hubungan ini dirangkum melalui dua peristiwa penting. *Pertama*, PM Scott Morrison mengumumkan larangan Huawei dan partisipasi ZTE milik Tiongkok dalam jaringan 5G di Australia. *Kedua*, keputusan PM Scott Morrison dalam menyerukan penyelidikan independen tentang asal dan perkembangan COVID-19. Artikel yang ditulis oleh Colin Mackerras (2021) juga sepakat bahwa pandemi COVID-19 turut berperan dalam mempertajam ketegangan hubungan diplomatik kedua negara. Sebab, secara tidak langsung keputusan penyelidikan semacam itu akan menyudutkan Tiongkok sebagai pihak yang bersalah karena telah memulai terjadinya pandemi (Mackerras, 2021: 39).

Sebagai pihak yang disudutkan, Pemerintah Tiongkok tentunya tidak diam dan dengan cepat membalas perilaku PM Scott Morrison melalui pemberlakuan pembatasan ekspor bagi komoditas anggur Australia dan mengenakan tarif masuk hingga 200% pada tahun 2020 (Kizekova, 2021: 202). Selain itu, Tiongkok menindaklanjuti sanksi ekonominya dengan melakukan pemblokiran ekspor daging sapi dan jelai Australia (CSIS, 2020: 27). Bahkan, dalam perjalanannya Tiongkok juga memblokir akses komunikasi sebagai tanda pembekuan dialog bagi Presiden Xi Jinping dan PM Scott Morrison. Namun, PM Scott Morrison menyebut bahwa Australia tidak terintimidasi dan menegaskan pihaknya tidak akan memulai dialog karena itu akan menunjukkan kelemahan. Ini menyiratkan PM Scott Morrison ingin menunjukkan ketahanan Australia atas tekanan ekonomi yang dialami dan enggan mengubah kebijakan luar negerinya agar sesuai dengan keinginan Tiongkok.

Tidak lama berselang dari peristiwa tersebut, Tiongkok semakin mempekeruh ketegangan hubungan diplomatiknya dengan Australia. Kedutaan Besar Tiongkok mengeluarkan ultimatum yang memuat 14 poin keluhan dan teguran tajam terhadap Australia. Ultimatum tersebut menjadi tanda eskalasi konflik yang terjadi antar kedua negara. Namun, alih-alih tunduk terhadap ultimatum, Australia justru enggan menanggapi sikap Tiongkok. Konteks di atas semakin menunjukkan bahwa terjadi perubahan cara pandang Australia terhadap Tiongkok. Terlepas dari perkembangan hubungan ekonomi kedua negara yang sangat dinamis, keputusan PM Scott Morrison menegaskan ketergantungan ekonomi dan perdagangan yang ditawarkan Tiongkok dinilai tidak lebih penting dibandingkan harga diri Australia.

Bahkan, menurut PM Scott Morrison, walaupun Australia merupakan negara yang menjunjung tinggi perdagangan terbuka, namun pihaknya tidak akan pernah memperdagangkan dan mempertaruhkan nilai-nilai yang diyakini oleh Australia sebagai tanggapan atas paksaan ekonomi yang dilakukan Tiongkok. Pernyataan tersebut termuat dalam wawancara PM Scott Morrison di Stasiun Radio Sydney 2GB sebagai berikut :

“We are an open-trading nation, mate, but I’m never going to trade our values in response to coercion from whenever it comes” (Reuters, 2022).

Dengan mempertimbangkan penjelasan di atas, tentu sulit menemukan peluang kedua negara untuk berkompromi satu sama lainnya. Oleh karena itu, penting untuk mengkajinya melalui penelitian berjudul **“Perubahan Kebijakan Luar Negeri Australia terhadap Tiongkok pada Masa Pemerintahan Scott Morrison”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penerapan kebijakan luar negeri Australia yang kontroversial terhadap Tiongkok khususnya di bawah pemerintahan PM Scott Morrison sangat menarik untuk diteliti. Sebab, realitas menunjukkan bahwa hubungan diplomatik kedua negara dapat terbilang cukup harmonis sejak diresmikannya pada tahun 1972. Bahkan, melalui ACHFTA kedua negara telah sepakat mengakui satu sama lain sebagai mitra strategis komprehensif. Dengan demikian, apabila ditinjau dari dimensi ekonomi tentunya sulit membayangkan sikap Australia untuk berani berselisih dengan Tiongkok.

Namun sebaliknya, ketika berhasil menjabat sebagai Perdana Menteri Australia, Scott Morrison justru tampil percaya diri dan yakin untuk mengambil kebijakan antagonis terhadap Tiongkok. Padahal, tingkat dependensi ekonomi Australia terhadap Tiongkok sangat tinggi. Sehingga, pemberlakuan kebijakan koersif Tiongkok akan menjadi pukulan yang begitu besar bagi produktivitas berbagai industri ekonomi di Australia. Dengan membatasi penelitian pada kebijakan luar negeri Australia selama pemerintahan PM Scott Morrison (2018-2022) maka diajukan pertanyaan penelitian berikut ini :

1. Seperti apa perubahan dalam kebijakan luar negeri Australia terhadap Tiongkok selama masa pemerintahan PM Scott Morrison hingga mendorong kemunduran hubungan diplomatik yang signifikan?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kebijakan luar negeri Australia terhadap Tiongkok pada masa pemerintahan PM Scott Morrison?

1.3 Tujuan Penelitian

Pada sub-bab ini, peneliti akan memaparkan tujuan penelitian ini yang memuat dua tujuan utama. *Pertama*, tujuan dari tesis ini adalah untuk mengetahui perubahan dalam kebijakan luar negeri Australia terhadap Tiongkok di masa pemerintahan PM Scott Morrison. Perubahan yang dimaksud adalah penerapan kebijakan luar negeri Australia yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebab, di bawah PM Scott Morrison Pemerintah Australia secara konsisten menerapkan kebijakan luar negeri yang mengarah pada kebijakan Anti-Tiongkok. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui wujud dari serangkaian perubahan kebijakan luar negeri Australia yang dilakukan PM Scott Morrison terhadap Tiongkok baik dari sisi ekonomi, politik maupun sosial-budaya.

Tidak berhenti di sana, tujuan *kedua* dari penelitian ini adalah untuk memperkaya informasi dalam penyelidikan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kebijakan luar negeri Australia terhadap Tiongkok pada masa pemerintahan PM Scott Morrison. Dalam hal ini, ‘perubahan’ dalam kebijakan luar negeri tentunya tidak serta-merta terjadi begitu saja namun terdapat faktor-faktor yang turut mempengaruhinya baik secara internal maupun eksternal.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan dua manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Secara teoritis, penelitian ini dengan topik ‘perubahan kebijakan luar negeri’ diharapkan memberikan kontribusi terhadap studi Hubungan Internasional. Walaupun sesungguhnya telah banyak studi empiris tentang perubahan

kebijakan luar negeri. Namun, literatur yang saat ini berkembang terkait perubahan kebijakan luar negeri umumnya hanya berfokus pada ‘perubahan’ dramatis pada satu isu kebijakan luar negeri tertentu dan bukan restrukturisasi menyeluruh. Sedangkan, keunikan dari penelitian ini adalah tidak hanya mengungkap satu sisi perubahan, tetapi menggambarkan terjadinya perubahan simultan di berbagai domain kebijakan luar negeri. Tentunya, ini diperoleh dengan mengkaji perubahan dalam hubungan bilateral yang masuk pada kategori analisis kebijakan luar negeri yang lebih luas. Atas dasar pemikiran ini, penulis berharap penelitian ini dapat menjadi artefak yang unik dan fokus publikasi terkini bagi studi Hubungan Internasional.

Di sisi lain, studi perubahan kebijakan luar negeri ini tidak terlepas dari kajian *foreign policy analysis*. Namun, khusus mengenai studi perubahan kebijakan luar negeri dari sudut pandang Realisme Neoklasik menekankan bahwa perubahan yang sifatnya kecil sampai yang sifatnya besar tidak dapat dilepaskan oleh faktor-faktor domestik dan internasional. Sehingga, penelitian ini mencoba menjelaskan perubahan kebijakan luar negeri melalui model terintegrasi dengan pola penyelidikan di berbagai tingkat analisis yaitu tingkat internasional, dalam negeri, hingga individu.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi penelitian ini dapat menjadi acuan dan perbandingan akademis bagi mahasiswa maupun dosen yang ingin meneliti mengenai topik yang sama serta bagi penelitian-penelitian selanjutnya terkait kebijakan luar negeri Australia terhadap Tiongkok. Selain memiliki manfaat akademis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para pemangku kepentingan, Lembaga Swadaya Masyarakat, *civil society* sebagai bahan informasi dan evaluasi penting dalam menganalisis perubahan kebijakan luar negeri suatu negara.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis akan memaparkan sistematika penulisan yang mencakup gambaran besar dan analisis utama. Pada dasarnya sistematika penulisan ini terbagi menjadi enam bab yaitu:

BAB I – PENDAHULUAN

Pada bagian pendahuluan, penulis menjabarkan latar belakang sebagai bagian utama dari penelitian. Secara umum, pembahasan pada latar belakang memberikan pemahaman terkait sejarah hubungan diplomatik Australia-Tiongkok sejak meraih kemerdekaannya hingga pada terjadinya penurunan hubungan diplomatik yang signifikan di bawah pemerintahan PM Scott Morrison. Selanjutnya, pada bagian ini penulis juga menjabarkan secara rinci terkait rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian serta sistematika penulisan dari penelitian ini.

BAB II – KERANGKA BERPIKIR

Pada bab kedua yaitu kerangka berpikir. Substansi dalam bab ini penulis fokuskan untuk menjabarkan tinjauan pustaka serta tinjauan teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pembahasan pada tinjauan pustaka akan berisikan sumber-sumber dari penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Tidak berhenti di sana, pada bab ini penulis juga menjabarkan tinjauan teori yang diawali dengan Perspektif Realisme dan Teori Realisme Neoklasik sebagai rujukan utama untuk menjawab rumusan masalah. Selain itu, penulis juga memuat konsep Realisme Ofensif untuk menunjang dan membantu analisis dalam penelitian ini.

BAB III – METODOLOGI PENELITIAN

Pada bagian ini, penulis menguraikan metodologi penelitian ini yang di dalamnya akan memuat pendekatan penelitian dan metode penelitian yang akan digunakan. Selain itu, pada bab ini penulis juga akan menjabarkan bagaimana cara yang penulis lakukan untuk mengolah data yang relevan dengan topik penelitian ini.

BAB IV DAN BAB V – ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Secara khusus, analisis dan pembahasan pada penelitian ini dibagi ke dalam dua bab terpisah yaitu pada bab IV dan bab V. Pembahasan pada bab IV difokuskan untuk menjawab rumusan masalah yang pertama. Pembahasan di dalamnya memuat hasil perbandingan dua tren yang kontras pada kebijakan luar negeri Australia terhadap Tiongkok, yaitu ‘sebelum’ dan ‘saat berlangsungnya’ pemerintahan Scott Morrison sehingga wujud dari perubahan dapat dibuktikan dengan jelas. Sedangkan, pembahasan pada bab V diproyeksi untuk menjawab rumusan masalah terakhir dan merupakan implementasi dari kerangka analisis yang telah ditetapkan. Pada bab ini, penulis mengelaborasi penerapan teori Realisme Neoklasik Tipe III dalam upaya mengidentifikasi faktor-faktor potensial yang mempengaruhi perubahan kebijakan luar negeri Australia terhadap Tiongkok pada masa pemerintahan Scott Morrison.

BAB VI – PENUTUP

Bagian ini merupakan bab terakhir dari penelitian. Pada bab ini, penulis akan meringkas inti dan hasil dari penelitian yang telah dikemukakan pada bab analisis dan pembahasan. Selain itu, penulis juga akan mencantumkan saran-saran dari penelitian ini untuk dapat dilengkapi pada penelitian berikutnya.